

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 DALAM OPTIMALISASI KOORDINATIF PERAN INSPEKTORAT KODAM VII/WIRABUANA UNTUK MENINGKATKAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK KODIM 1306/DONGGALA

Sainul Alam

Alamsainul89@yahoo.com

(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

The research was aimed at analyzing the Policy Implementation of Article Number 34/2004 in optimizing coordinative role of Kodam VII/Wirabuana Inspectorate to improve the main job realization of Kodim 1306/Donggala. The method of the research was qualitative research. The number of informan was five people, who were chosen based on purposive sampling. The techniques of data collection which were used included observation, interview and documentation. Based on the analysis, the policy implementation of Article Number 34/2004 in optimizing coordinative role of Kodam VII/Wirabuana Inspectorate to improve the main job realization of kodim 1306/Donggala ran quite well. From the six indicators, only one dimension which ran less well, that was on the dimension of human resources; while other dimensions like policy standard and goal, executor organization characteristic, executors attitude, communication inter organization, and social, economical and political environment.

Keywords: *Implementation, Policy, Coordinative, Inspectorate, Main Job Realization*

Seiring dengan arus reformasi, telah terjadi pergeseran tata nilai dalam kehidupan sosial masyarakat dalam dimensi pola pikir, pola sikap dan pola hidup yang bermuara pada konstelasi dinamika kehidupan sosial masyarakat. Konsekuensi logis transpormasi kehidupan sosial tersebut, berimplikasi pada kehidupan Nasional, termasuk dalam kehidupan berorganisasi. Relevansinya dalam berorganisasi, dimana terdapat berbagai aktivitas untuk pencapaian tujuan organisasi, transpormasi kehidupan berdampak pada kebijakan, Strategi dan kinerja organisasi secara taktis administrasi serta taktis operasional.

Konsekuensi lain, dampak dari transpormasi kehidupan dari sudut pandang dinamika dan kompleksitas kehidupan sosial masyarakat, secara langsung atau tidak langsung, dapat memunculkan berbagai permasalahan dalam kehidupan berorganisasi khususnya pada Kodim 1306/Donggala, berupa kendala atau suatu penyimpangan.

Dalam konteks demikian fungsi pengawasan memiliki peran strategis dalam arti bahwa suatu organisasi akan tetap berjalan pada rel dan koridor yang telah ditentukan, bukan dalam arti mencari suatu kesalahan sebagaimana opini yang sering berkembang tentang sudut pandang kinerja pengawasan.

Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan di Kodim 1306/Donggala, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan berorganisasi yang diselaraskan dengan kebijakan, rencana program dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi, perbaikan kinerja, peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, serta pelaksanaan koordinatif, demikian juga dalam rangka kelancaran tugas organisasi dengan ruang lingkup pengawasan dan pemeriksaan, meliputi semua rangkaian kegiatan, termasuk pada lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Secara umum hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kodam VII/Wirabuana di jajaran Kodam VII/Wirabuana pada tanggal 15 Nopember 2011 ditemukan berbagai permasalahan sbb :

1. Kelambatan penyelesaian pekerjaan.
2. Prosedur kerja dan tertib administrasi masih sering diabaikan.
3. Kurangnya disiplin dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan.
4. Penempatan personil tidak berdasarkan pada kompetensi.

Bila dicermati, kondisi sumber daya manusia yang ada di Kodim 1306/Donggala, merupakan pertanda bahwa penjabaran Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara optimalisasi maupun koordinatif belum sepenuhnya berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

Esensi dasar pada optimalisasi khususnya pada pengawasan melekat, dalam arti timbulnya kesadaran, kepedulian dan tanggung jawab terhadap berbagai aktivitas yang berkaitan dengan mekanisme dan pencapaian tujuan organisasi.

Rangkaian dari fenomena tersebut selama ini adalah adanya anggapan bahwa, optimalisasi dan koordinatif merupakan kegiatan dan tanggung jawab Inspektorat. Ini menunjukkan bahwa masih ada komponen prajurit yang kurang memahami esensi dan substansi hal tersebut pada kehidupan berorganisasi, kinerja dalam dimensi pengawasan melekat, adalah setiap kegiatan dalam usaha mencapai tujuan organisasi merupakan tanggung jawab setiap orang pada organisasi tersebut.

Berbagai permasalahan yang ditemukan dalam kehidupan berorganisasi, seperti, terlambat dalam penyelesaian pekerjaan (tertunda) serta kecenderungan mengabaikan prosedur yang berlaku dan sebagainya, akibat dari sumber daya manusia yang belum memadai. Jika dibiarkan berlangsung dan menjadi budaya dalam kehidupan berorganisasi, pada gilirannya akan

berdampak pada kinerja setiap Instansi/Lembaga, selanjutnya menjadi preseden buruk atau masa lalu yang buruk yang bermuara pada timbulnya kerugian negara.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah di jabarkan dalam bentuk pertanyaan, Bagaimana mengimplementasikan Kebijakan Undang-Undang No 34 Tahun 2004 dalam optimalisasi kordinatif yang dilakukan oleh Inspektorat Kodam VII/ Wirabuana untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pokok Kodim 1306/Donggala ?.

Berdasarkan Rumusan Masalah, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Implementasi Kebijakan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 dalam Optimalisasi Koordinatif Peran Inspektorat Kodam VII/Wirabuana Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pokok Kodim 1306/Donggala.

METODE

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam dan akurat, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data tampak (Sugiyono, 2005: 3).

Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif suatu realitas atau obyek tidak dapat dilihat secara parsial tetapi dapat dipandang secara holistic (menyeluruh).

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2005:62). Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif agak berbeda dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif, menurut Sugiyono (2005:62), dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, sumber, dan cara.

1. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Teknik Observasi adalah cara atau metode dalam pengumpulan data secara langsung oleh peneliti. Pengumpulan data dilakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang tampak pada obyek penelitian (Nawawi, 2003:100). Hal tersebut bisa dilakukan terhadap aktivitas-aktivitas aparat/pegawai baik di dalam maupun diluar kantor.
- b. Teknik wawancara dipergunakan untuk memperoleh keterangan maupun penjelasan dari nara sumber/informan dengan jalan melakukan wawancara secara langsung (*face to face*) dan mendalam untuk mendapatkan informasi yang akurat.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia untuk dimanfaatkan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kaitan kajian studi (penelitian).

Sumber data sekunder berupa dokumentasi yang dipergunakan untuk memperoleh data tertulis dari sumber resmi. Yin (2002:104) menjelaskan bahwa berkaitan dengan kesimpulan pertemuan, laporan peristiwa tertulis, laporan penelitian, proposal untuk proyek, surat kabar, laporan kemajuan kejadian, klipng dan artikel dari sumber bahan cetak lainnya sangat bermanfaat sebagai data sekunder dan data ilmiah.

Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif suatu realitas atau obyek tidak dapat dilihat secara parsial tetapi dapat dipandang secara *holistic* (menyeluruh). Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2005:62).

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif agak berbeda dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif, menurut

Sugiyono (2005:62), dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Kodam VII/Wirabuana merupakan suatu rangkaian yang mempunyai nilai-nilai historis penting sebagai salah satu unsur pembinaan Satuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok.

Likuidasi Kodam XIII/Merdeka dengan Kodam XIV/Hasanuddin menjadi Kodam VII/Wirabuana., Awal tahun 1984 terjadi reorganisasi di lingkungan ABRI untuk mewujudkan ABRI yang Kecil, Efektif, Efisien (KEE). Reorganisasi ABRI ini berpengaruh terhadap organisasi TNI AD. Panglima ABRI mengeluarkan Keputusan Nomor : Kep/08/P/III/1984 tanggal 31 Maret 1984 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur TNI AD. Latar belakang lahirnya keputusan tersebut didasari pada hakekat ancaman yang dihadapi, rentang kendali organisasi, efesiensi biaya dan pembinaan personel serta performance satuan-satuan tempur.

Berdasarkan surat perintah Pangdam XIII/Merdeka Nomor Sprin/709/8/1961 tanggal 9 Agustus 1961 dibentuklah Korem II/Sulteng dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Sulawesi Tengah dengan membawahi 4 (empat) Kodim termasuk didalamnya Kodim 1306/Donggala.

Kodim 1306/Donggala yang berkedudukan di Ibukota Sulteng (Palu) dengan wilayah kerja Kabupaten Donggala dan 17 (tujuh belas) Koramil.

Kodim 1306/Donggala sebagai bagian dari TNI – AD bertugas pokok menegakkan kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah darat di Kota Palu, Kabupaten. Donggala, Kabupaten. Parigi Moutong dan Kabupaten. Sigi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia di wilayah daratan Kodim 1306/Donggala dari ancaman

dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.

Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kodam VII/Wirabuana menunjukkan adanya upaya memaksimalkan kinerja satuan di jajaran Kodam VII/Wirabuana. Sistem pengawasan dan pemeriksaan merupakan unsur manajemen yang penting dalam rangka mewujudkan kinerja satuan di lingkungan Kodam VII/ Wirabuana yang mampu merespon secara signifikan berbagai macam permasalahan dan perubahan yang terjadi baik kebijakan Komando atas dalam mengoptimalisasi secara koordinatif peran Inspektorat Kodam VII/Wiarabuana serta bidang politik, ekonomi maupun sosial melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan yang menyeluruh.

Gambaran kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dilaksanakan tersebut pada intinya berdasarkan pada fungsi pengawasan dilihat dari sudut pandang kedisiplinan dan kreativitas, tertib administrasi, laporan tepat waktu dan penempatan personil.

Standard Pelaksanaan pembinaan teritorial yang dilakukan oleh Kodim 1306/Donggala dengan luas wilayah tiga Kabupaten dan satu Kota merupakan standar secara umum yaitu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) bahwa TNI dalam melaksanakan tugas pokok melakukan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Operasi Militer Selain Perang yang dilaksanakan TNI diantaranya membantu

tugas Pemerintah Daerah, dengan dasar ini maka dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang terpadu dan dalam penjabarannya diturunkan direktif dari Kodam VII/Wirabuana selaku Kotama Pembinaan, tentunya penjabaran Kodam VII/Wirabuana adalah penjabaran dari kebijakan Presiden Republik Indonesia ataupun adanya perjanjian kerja sama antara TNI dengan salah satu Menteri dalam bentuk Memorandum Of Understanding (MOU).

Observasi yang dilakukan pada kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inpektorat Kodam VII/Wirabuana terhadap Kodim 1306/Donggala, dilihat dari sudut pandang satandard dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Karakteristik pelaksana, Komunikasi antar organisasi dan sikap para pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Standard dan sasaran kebijakan yang sering digunakan bersifat normatif diantaranya kedisiplinan, kreativitas, tertib administrasi, laporan tepat waktu dan penempatan personil yang dilakukan oleh Kodim 1306/Donggala masih kurang optimal dan efektifitas kinerja belum maksimal.

Hasil observasi selama tahun 2011, pengawasan dan pemeriksaan dari Inspektorat Kodam VII/Wirabuana, dalam kurun tiga tahun terakhir ini diindikasikan bahwa kinerja Kodim 1306/Donggala menurut pencapaian hasil kerja mulai dari *input, proses, output, outcome, benefit dan impact* menunjukkan penurunan dalam persentasenya, sesuai data pada atensi dan tindak lanjut temuan pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) Inspektorat Kodam VII/Wirabuana terhadap Kodim 1306/Donggala sebagai berikut:

Tabel 1. Persentase Temuan, Atensi dan Tindak Lanjut Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) di Kodim 1306/Donggala

No	Kegiatan	2009	2010	2011
1	Laporan Temuan	45,5%	34,9%	10,4%
2	Atensi	30,5%	26,5%	24,9%
3	Tindak Lanjut	17,8%	14,5%	11,0%

Sumber: Kodam VII /Wirabuana, 2012

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program kerja berjalan sesuai dengan ukuran dan tujuan kebijakan, namun terkendala dengan jarak dan luas wilayah kerja sangat mempengaruhi tingkat efektifitas dan kinerja Kodim tersebut. Meskipun demikian, hingga kini telah diupayakan kebijakan-kebijakan terkait dengan pelaksanaan koordinasi antar daerah dengan menggunakan Perwira Penghubung (Pabung), sehingga dapat mengatasi setiap langkah kerja tugas pokok TNI AD yang ada di lingkungan Kodim 1306/ Donggala. Inspektorat Kodam VII/Wirabuana dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan secara koordinatif sehingga dapat berjalan dengan lancar, aman dan tertib berdasarkan program yang telah ditentukan, sesuai lingkup tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya. Menurut Sersan Kepala Stenly Lemuwa Bintara Pelatih Operasi Kodim 1306/Donggala terkait Wilayah teritorial tiga Kabupaten dan satu Kota dengan standar kebijakan satu Kodim dalam pelaksanaan Kebijakan Kodam VII/Wirabuana bahwa:

“ Dengan terbaginya tiga Kabupaten dan satu Kota wilayah teritorial Kodim 1306/Donggala ditinjau dari kebijakan Kodam VII/Wirabuana tidak ada kendala karena selama ini sebelum wilayah Kabupaten dan Kota dimekarkan kebijakan kodam VII/Wirabuana sudah terlaksana dan berjalan sesuai program Kodam VII/Wirabuana, hanya tingkat koordinasi Dandim 1306/Donggala dengan Forum Koordinasi Pimpinan

Daerah terkadang mengalami hambatan khususnya kepada Bupati, karena masing-masing Kabupaten dan Kota kebijakannya lain “. (Wawancara, di Palu, 18 Nopember 2012).

Menyimak pernyataan diatas bahwa, setiap Kabupaten dan Kota berbeda kebijakannya, ukuran dan tujuan kebijakan setiap daerah tidak sama, sering terkendala oleh kebijakan Pimpinan Daerah , dikarenakan adanya kekhawatiran kesalahan prosedur yang menyalahi kebijakan Pemerintah Pusat.

Sebagaimana yang ditegaskan oleh seorang Babinsa berpangkat Tamtama Kopral Kepala Ali Ibrahim, Wilayah teritorial tiga Kabupaten dan satu Kota dengan standar kebijakan satu Kodim dalam pelaksanaan Kebijakan Kodam VII/Wirabuana, bahwa:

“Saya selaku Babinsa menilai bahwa, Kodim 1306/Donggala selama ini tetap melaksanakan program secara terpadu dengan Pemerintah Daerah, sekalipun wilayahnya cukup luas dan sekarang sudah terbagi tiga Kabupaten dan satu Kota tetap satu Kodim contohnya pada pelaksanaan Program TMMD, membantu Pemda dan masyarakat dalam membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum, karena setahu saya program ini sudah lama terlaksana sampai dengan saat ini, kebijakan Kodam untuk menambah Kodim tiap Kabupaten atau Kota belum ada ”. (Wawancara, di Palu 18 Nopember 2012).

Hasil analisa diatas bahwa, Kodim 1306/Donggala dengan membawahi tiga Kabupaten dan satu Kota dengan wilayah begitu luas, dengan standar kebijakan satu Kodim, secara lahiriah tetap akan berpengaruh terhadap pelaksanaan program kerja dengan luas wilayah dan berpengaruh pada efektifitas kinerja personel Kodim 1306/Donggala, hal ini lebih diberi penekanan pada perspektif pelaksanaan tugas pokok sesuai kebijakan yang sudah terprogram dari Komando atas (Kodam VII/Wirabuana).

Dalam hal keterkaitannya dengan luas wilayah dan kesejahteraan personel dalam latihan, diutarakan oleh Mayor Inf Nur Wahid Pamen Korem 132/Tadulako tentang bagaimana tingkat kesejahteraan personel TNI AD dalam latihan .

“Saya melihat pada program kerja yang sudah ada, dan saat saya melaksanakan pengawasan latihan di Kodim 1306/Donggala, kegiatan yang direncanakan maupun yang dilaksanakan itu sama, tidak ada penyelewengan yang dilakukan oleh pelaku latihan dalam hal ini Kodim 1306/Donggala, semua kegiatan terlaksana dengan baik dan tertib “. (Wawancara, di Palu 18 Nopember 2012).

Analisa dari pernyataan ini bahwa, tingkat kesejahteraan personel Kodim 1306/Donggala yang melaksanakan latihan terpenuhi, ukuran dan tujuan kebijakan sesuai standar kebijakan, komunikasi serta sikap para pelaksana tidak berjalan sebagaimana mestinya, dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kodam VII/Wirabuana masih diketemukan dalam pemeriksaan administrasi, pertanggungjawaban keuangan tidak sesuai dengan peruntukannya, sesuai hasil observasi bahwa, pelanggaran dalam pelaksanaan latihan jarang terjadi, hanya pada pertanggungjawaban administrasi sering

terjadi kekeliruan, sehingga menjadi temuan bagi tim pengawas dan pemeriksa.

Hal ini juga diungkapkan Kapten Inf Syamsul Bahri Pasi Ops Kodim 1306/Donggala tentang tingkat kesejahteraan personel TNI AD. Hal ini dapat dilihat dari kinerja staf maupun pelaksanaan tingkat latihan yang merupakan suatu kebutuhan perorangan secara profesional, menjadi dorongan dan motivasi dalam meningkatkan kinerja dan disiplin para anggota TNI AD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di wilayah tanggungjawabnya.

“Pada prinsipnya kesejahteraan personel dalam melaksanakan latihan sudah memenuhi standar yang ditentukan oleh TNI AD karena setiap program yang telah direncanakan tercantum indeks untuk dukungan bagi personel pelaku dalam latihan maupun penyelenggara latihan baik uang makan dan uang saku, dukungan dana latihan sesuai indeks, namun kenyataan personel yang terlibat dalam pelaksanaan latihan terkadang tidak diberikan secara utuh maupun personel yang terlibat tidak sesuai dalam perencanaan dengan alasan untuk kebutuhan lain, hal ini menjadi temuan Tim Pengawasan dan Pemeriksaan Inspektorat Kodam VII/Wirabuana”. (Wawancara, di Palu, 19 Nopember 2012).

Hasil analisa pernyataan diatas bahwa, kesejahteraan personel TNI AD didalam pelaksanaan latihan merupakan kewajiban Komando atas (Staf Umum Angkatan Darat) merencanakan program latihan termasuk dukungan anggaran latihan baik pelaku maupun penyelenggara latihan.

Anggaran bidang latihan yang digunakan Kodim 1306/Donggala tahun 2012 sebagai berikut:

Tabel 2. Dukungan Anggaran Bidang Latihan Kodim 1306/Donggala

No	Satuan/Uraian kegiatan	Indek	Keterangan
	Kodim 1306/Donggala		
1	Operasi Latihan	Rp 108.541.600,-	
2	Uang Saku	Rp 78.200.000,-	
3	Uang Makan	Rp 215.050.000,-	

Sumber: Korem 132/Tadulako, 2012

Standard dan ukuran kebijakan juga terkait dengan tersedianya dana Latihan bagi anggota TNI AD yang berada dalam lingkungan setiap Kodim.

Prosedur tetap tentang penggunaan anggaran latihan dapat dipedomani sebagai referensi dalam pelaksanaan latihan.

Hal ini menurut Pasi Ops Kodim 1306/Donggala tentang Prosedur tetap (Protap) berjalan sesuai kebijakan Komando struktur lebih tinggi. Protap dalam lingkungan TNI AD telah menjadi sebuah kebijakan yang didasarkan Undang-undang yang berlaku. Protap sebagai standard dan ukuran kebijakan untuk mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan kegiatan *intern* dan yang *ekstern* terkoordinasi dengan instansi lain dalam membantu masyarakat. Korem 132/Tadulako yang membawahi Kodim 1306/Donggala menjalankan Protap yang telah ditetapkan.

Kapten Inf Syamsul Bahri Pasi Ops Kodim 1306/Donggala menyatakan bahwa:

“Protap satuan yang ada di Kodim 1306/Donggala, merupakan piranti yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi satuan TNI AD dalam setiap bentuk kegiatan yang harus dilaksanakan baik

yang bersifat program maupun non program agar kegiatan tersebut mempunyai payung hukum dan protap satuan ini merupakan penjabaran kebijakan Komando atas (Kodam, Korem), guna kelancaran pada pencapaian tugas pokok satuan agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang dan tanggungjawab baik secara pribadi maupun kelompok ”. (Wawancara, di Palu, 27 Nopember 2012)

Dipahami bahwa penggunaan protap satuan yang dilaksanakan dalam segala bentuk kegiatan dengan tujuan menghindari kesalahan-kesalahan, kelalaian maupun bentuk kelemahan lainnya agar tidak berdampak negatif terhadap pencapaian tugas pokok pengguna dalam hal Kodim 1306/Donggala.

Sumber kebijakan dalam kerangka konsep ini adalah Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia merupakan kebijakan mendasar dalam lingkungan TNI AD. Lingkungan TNI AD pada Korem 132/Tadulako dan Kodim 1306/Donggala menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas, fungsinya. Hal ini dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Personel Kodim 1306/Donggala Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

NO	GOLONGAN	JML PERS	DIK MIL	DIK UM		KET
				SMA	S1	
1	Perwira	23	23	19	4	
2	Bintara	237	237	236	1	
3	Tamtama	71	71	71	-	
4	PNS	15	15	15	-	
	Jumlah	346	346	341	5	

Sumber: Kodim 1306/Donggala, 2012

Kebijakan Sumber daya Manusia pada lingkungan TNI AD di Korem 132/Tadulako dan Kodim 1306/Donggala. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Mayor Inf Nur Wahid Pamen Korem 132/Tadulako, bahwa:

“Berdasarkan penilaian dari kegiatan yang dilakukan, dari aspek pendidikan sumber daya manusia masih sangat rendah, karena hanya beberapa orang yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana, sedangkan yang lainnya hanya sampai tingkat SMA, kehidupan di era modern ini teknologi yang semakin canggih tentunya sumber daya manusia yang ada harus mampu beradaptasi dan menguasai teknologi ini, sedangkan penduduk di wilayah Kodim 1306/Donggala tingkat pendidikan banyak yang sudah sarjana, dimana pengetahuan tentang ilmu maupun penerapan teori secara aplikatif, masyarakat jauh lebih menguasai dibanding dengan sumber daya manusia yang ada di Kodim 1306/Donggala”. (Wawancara, di Palu, 29 Nopember 2012)

Pendidikan secara formal personel Kodim 1306/Donggala belum memenuhi kriteria sebagai Pembina wilayah teritorial, karena kemampuan dari segi pendidikan masih sangat minim, hasil observasi menunjukan personel Kodim 1306/Donggala

yang bertugas di Daerah Perkotaan yang hampir secara keseluruhan atau mayoritas pendidikan masyarakat perkotaan adalah sarjana.

Menurut Kopral Kepala Yudo Hertono Tamtama Kodim 1306/Donggala untuk mengetahui Pendidikan dan Latihan dalam peningkatan Sumber Daya Manusia Kodim 1306/Donggala menjadi penting dalam peningkatan kinerja terkait tugas, dan fungsi TNI pada lingkungan Kodim 1306/Donggala. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan Pendidikan dan Latihan dalam kerangka kebijakan peningkatan kualitas pendidikan formal anggota TNI tersebut.

“Pendidikan dan latihan yang dilaksanakan oleh Kodim 1306/Donggala khususnya pendidikan dalam satuan yaitu mendidik personel baru, yang selama ini belum mengerti tentang pembinaan teritorial karena sebelumnya berada di satuan tempur atau di Batalyon, Kodim 1306/Donggala mempunyai satu Koramil Model dimana Koramil tersebut tempat mendidik personel baru sebelum melaksanakan kegiatan di wilayah binaannya”. (Wawancara, di Palu, 25 Nopember 2012)

Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang memadai, Kodim 1306/Donggala mempunyai satu Koramil Model yaitu Koramil 07/Tawaeli, sebagai

pusat pendidikan informal (latihan dalam satuan) bagi personel baru ditempatkan di Kodim 1306/Donggala (Personel dari Batalyon).

Dengan tersusunnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 tahun 2004 diatas sehingga dapat memperjelas Kebijakan Kodam VII/Wirabuana dan merupakan payung hukum untuk menghadapi segala bentuk ancaman.

Menurut Mayor Inf Nur Wahid Pamen Korem 132/Tadulako bahwa untuk mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh Kodam VII/Wirabuana dapat diterima oleh seluruh personel Kodim 1306/Donggala. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kodam VII/Wirabuana untuk diimplementasikan dapat menjadi pedoman terhadap program pembinaan Teritorial (Binter).

“Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kodam VII/Wirabuana, merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan sehingga Kodim 1306/Donggala menjabarkan kebijakan tersebut dalam bentuk kegiatan atau program Binter (pembinaan teritorial) dan seluruh personel Kodim 1306/Donggala menerima kebijakan tersebut, karena kebijakan itu menyentuh kepentingan masyarakat banyak “. (Wawancara, di Palu, 22 Oktober 2012)

Dengan demikian, kebijakan Kodam VII/Wirabuana merupakan perintah yang harus dilaksanakan, kebijakan itu turun ke Kodim 1306/Donggala berupa program atau penjabaran perintah dari Pimpinan pusat.

Selanjutnya menurut Sersan Mayor I Nengah Bati Ter Kodim 1306/Donggala program ketahanan pangan berjalan dengan baik.

“Dalam rangka mendukung peningkatan ketahanan pangan di wilayah Kodim 1306/Donggala, lahan kosong yang tidak produktif baik di halaman kantor maupun halaman rumah diharuskan menanam tanaman jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan dapur, pada

perinsipnya diharapkan tidak ada lahan yang menganggur, itu langkah dan tindakan secara intern Kodim 1306/Donggala, untuk kegiatan keluar diharapkan partisipasi para pengusaha dan Instansi non Pemerintah sebagai pendamping untuk membantu modal masyarakat sebagai wujud partisipasi dalam membantu kegiatan ketahanan pangan Nasional. (Wawancara, di Palu, 21 Oktober 2012)

Adanya keseriusan dari Kodam VII/Wirabuana untuk menindaklanjuti program Pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan Nasional.

Profesionalisme prajurit merupakan kemampuan yang dimiliki oleh prajurit dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, komunikasi dan koordinasi dalam bidang tugas dan tanggungjawabnya kepada satuan yang lebih atas (Korem, Kodam) guna mensinkronisasikan kegiatan atau program yang akan dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah kesalahan yang akan berdampak pada pelaksanaan tugas pokok satuan.

Menurut Kapten Inf Syamsul Bahri Pasi Ops Kodim 1306/Donggala mengungkapkan para Perwira Staf Kodim 1306/Donggala sering berkoordinasi dengan staf Korem atau Kodam.

“Tugas dan tanggungjawab sebagai Pasi ops Kodim 1306/Donggala, sebagai staf perencana Kodim 1306/Donggala, selalu melaksanakan koordinasi dalam rangka pencocokan materi latihan pada program kerja dengan direktif yang diturunkan sering berbeda, termasuk pada bidang anggaran yang tidak sesuai dengan apa yang diterima dan apa yang tercantum dalam program kerja, tingkat koordinasi ini juga dilaksanakan oleh para Perwira Staf Kodim 1306/Donggala lainnya sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing”. (Wawancara, di Palu, 28 Oktober 2012)

Program kerja yang diterima dari komando atas bertujuan untuk mendapatkan

standar kemampuan umum perorangan, kemampuan tugas-tugas jabatan serta kemampuan kesegaran jasmani prajurit yang didukung oleh mental yang tangguh diseluruh jajaran Kodim 1306/Donggala.

Selanjutnya menurut Sersan Kepala Stenly Lemuwa Bati Ops Kodim 1306/Donggala mengungkapkan para Perwira Staf Kodim 1306/Donggala sering berkoordinasi dengan staf Korem atau Kodam.

“Setahu saya tingkat koordinasi yang dilakukan oleh para Perwira staf Kodim 1306/Donggala kepada Korem 132/Tadulako, adalah melaksanakan paparan Rencana Garis Besar (RGB) tentang rencana latihan yang akan dilaksanakan termasuk penggunaan anggaran, daerah latihan dan waktu pelaksanaan latihan, karena berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian latihan oleh Korem sebagai supervisi latihan tingkat Kodim dan Batalyon”. (Wawancara, di Palu, 27 Oktober 2012)

Pelaksanaan latihan perlu suatu perencanaan yang maksimal, sehingga perlu persiapan diantaranya para Perwira Kodim 1306/Donggala melaksanakan paparan Rencana Garis Besar (RGB) latihan sesuai bidangnya masing-masing didepan para unsur pimpinan satuan lain.

Selanjutnya menurut Kopral Kepala Yudo Hartono Tamtama Ops Kodim 1306/Donggala para perwira Staf Kodim 1306/Donggala sering berkoordinasi dengan staf Korem atau Kodam, bahwa:

“Setahu saya selaku Tamtama di Staf Ops Kodim 1306/Donggala seluruh Perwira Staf Kodim 1306/Donggala disaat mendapat perintah untuk melaksanakan kegiatan, baik program maupun non program selalu melaksanakan koordinasi ditingkat Korem, disesuaikan dengan tugas dan jabatannya masing-masing”. (Wawancara, 19 Oktober 2012)

Koordinasi dengan satuan tingkat atas (Korem) merupakan kewajiban satuan bawah untuk memperjelas sejauh mana tingkat latihan/kegiatan yang akan dilaksanakan.

Perkembangan lingkungan Sosial yang begitu dinamis telah mewarnai kehidupan masyarakat. Kemiskinan masyarakat semakin merajalela, hasil pertanian dan perkebunan semakin tidak ada harganya saat dijual, namun harga beli yang sangat tinggi, mengakibatkan perimbangan ekonomi dimasyarakat tidak pernah stabil.

Menurut Kapten Inf Syamsul Bahri Pasi Ops kodim 1306/Donggala tentang tindakan Kodim 1306/Donggala bila menghadapi gejala sosial diwilayahnya.

“Terjadinya gejala sosial dimasyarakat, tentu ada kebijakan Pemerintah yang tidak terkoordinasi dengan baik kepada masyarakat, sehingga adanya ketidakpuasan disalah satu pihak, sehingga menimbulkan gejala yang apa bila tidak segera dituntaskan akan berdampak luas kepada kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan “. (Wawancara, di Palu, 30 Nopember 2012).

Analisa dari permasalahan ini bahwa, kebijakan yang tidak terakomodir dengan baik akan berdampak pada gejala sosial dimasyarakat dan akan mengakibatkan lumpuhnya roda perekonomian masyarakat.

Selanjutnya pendapat Sersan Kepala Stenly Lemuwa Batih Ops Kodim 1306/Donggala sebagai berikut:

“Tindakan Kodim bila menghadapi gejala sosial diwilayah, langkah awal yang dilakukan harus mengetahui sebab kejadian, Komandan Kodim 1306/Donggala berkoordinasi dengan Kapolres setempat tentang solusi penyelesaiannya, bila masalah belum selesai, berkoordinasi dengan pimpinan daerah setempat tentang penyelesaian masalah”.

Sesuai hasil analisa diatas bahwa, koordinasi yang baik akan menghasilkan

ukuran dan tujuan kebijakan yang dikehendaki, dan akan membawa dampak terciptanya ketahanan wilayah yang tangguh yang pada gilirannya mampu mewujudkan rasa aman dan nyaman di daerah, sehingga mampu menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Implementasi kebijakan dengan penjabaran Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 dalam rangka optimalisasi koordinatif peran Inspektorat Kodam VII/Wirabuana dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok Kodim 1306/Donggala sejak diberlakukannya undang-undang tersebut mengalami beberapa kendala-kendala struktural organisatoris. Keterbatasannya sumber daya manusia, peralatan kerja dan fasilitas yang ada akan mempengaruhi pelaksanaan koordinatif antara kelembagaan dalam jajaran lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat menjadi (TNI AD) menjadi tidak efektif. Dalam konteks ini koordinasi Inspektorat Kodam VII/Wirabuana terhadap Kodim 1306/Donggala dalam peningkatan kinerjanya dapat yang berpatokan pada tugas pokok dan fungsi kelembagaan. Personel Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) sebagai potensi Sumber Daya Manusia didukung peralatan kerja dan fasilitas kerja yang terbatas dapat menjalankan tugas dan fungsi tersebut sebagai yang diamanatkan Undang-Undang sebagai penjawantahan Kebijakan Publik dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

Dalam implementasi kebijakan terhadap Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 pelaksanaan koordinatif Inspektorat Kodam VII/Wirabuana terhadap lembaga hirarki dibawahnya dapat dijelaskan pada aspek Standarisasi atau Ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber Daya Manusia (Kebijakan), Komunikasi antar Organisasi,

Sikap Para Pelaksana, Karakteristik Pelaksana Kebijakan, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Dari beberapa aspek tersebut, ternyata aspek Sumber Daya Manusia yang didukung peralatan kerja dan fasilitas kerja yang sangat terbatas sebagai patokan peningkatan kualitas kebijakan publik dalam rangka Implementasi kebijakan (*Policy Implementation*). Berdasarkan hasil penelitian bahwa Sumber daya Manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengalami kendala terutama terkait dalam membangun hubungan koordinatif antar kelembagaan. Hal inilah yang menjadi problematika efektifitas pengawasan dan pemeriksaan, pemanfaatan anggaran secara tepat sasaran. Oleh karena itu, optimalisasi koordinatif peran Inspektorat Kodam VII/Wirabuana untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pokok Kodim 1306/Donggala sebagai penjabaran Implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 di lingkungan TNI AD.

Rekomendasi

Setelah mencermati kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal yaitu:

1. Teoritis.

Terkait hasil penelitian bahwa teori implementasi kebijakan sebagaimana yang digunakan penulis yaitu Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) terdapat enam faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, ternyata faktor Sumberdaya, komunikasi dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik masyarakat di suatu daerah memberikan pengaruh peningkatan kinerja kualitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, beberapa hal yang menjadi saran teoritis terkait dengan implementasi kebijakan, yaitu 1). Penelitian dengan teori Van Meter dan Van Horn masih perlu dikembangkan oleh penelitian selanjutnya yang berminat dalam kajian peningkatan kualitas kinerja implementasi kebijakan dalam suatu

lembaga Militer. 2). Penelitian ini, dengan teori Van Meter dan dan Van Horn masih cocok untuk menjadi acuan kajian dalam lingkungan lembaga baik Militer maupun Pemerintah.

Untuk mengoptimalkan penerapan dari Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan maka dapat dilaksanakan efektivitas sebagai berikut:

- a. Optimalisasi Implementasi Kebijakan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, yang berkaitan dengan kinerja organisasi, bila ditinjau dari aspek efektif, efisien dan akuntabel dapat dijadikan pedoman untuk pengembangan Administrasi Publik.
- b. Perlu pelibatan akademisi atau pihak yang berkompeten untuk mengkaji kembali Implementasi Kebijakan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 terhadap kinerja organisasi, diaplikasikan dengan teori-teori pendukung agar dapat dijadikan referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang (referensi selain anggota Militer).

2. Praktis.

Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi kualitatif dalam rangka perumusan kebijakan terkait dengan implementasi kebijakan dalam lingkungan lembaga Militer. Penerapan kebijakan yang baik dan ideal amat ditentukan kemampuan sumber daya sebagai implementator di lapangan. Demikian pula para pengambil keputusan publik menjadi penting dalam memahami kebijakan publik dengan baik dan komprehensif, sehingga implementasi kebijakan dapat berlangsung dengan efektif. Hal ini disebabkan kualitas Sumber Daya Manusia didukung oleh peralatan kerja dan fasilitas kerja yang terbatas, sebagai pelaksana kebijakan berdasarkan penelitian, problematika implementasi kebijakan dalam

lingkungan jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat TNI AD) terkait pelaksanaan peran Inspektorat Kodam VII/Wirabuwana dalam fungsinya sebagai pengawas dan pemeriksa guna meningkatkan pelaksanaan tugas pokok Kodim 1306/Donggala selama ini tidak berlangsung secara efektif. dalam melaksanakan tugas koordinatif cenderung membuahkan hasil yang kurang memuaskan. Oleh karena itu, menjadi fokus yang hendak dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang didukung peralatan kerja dan fasilitas kerja yang memadai, Peningkatan kualitas Koordinatif antar lembaga, dan peningkatan pemahaman kualitas lingkungan ekonomi, social, dan politik.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 untuk mengefektifkan implementasi kebijakan diperlukan pemahaman mendalam terkait karakteristik kebijakan dan intensitas komunikasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas para anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) baik pada level prajurit hingga pada tingkat Perwira, serta melengkapi peralatan kerja dan fasilitas kerja sehingga dukungan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat berjalan secara efektif sesuai program-program yang telah ditentukan. Dengan demikian, Implementasi Kebijakan akan berlangsung dengan baik dengan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), Standarisasi, Komunikasi antar organisasi dapat berjalan dengan baik, berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Pembimbing Bapak Dr. Darwis, M.Si dan Pembimbing dua Bapak Dr. Nawawi Natsir, M.Siyang telah mencurahkan segenap waktu dan pikiran dalam membimbing. Dr. Muzakir Tawil, M.Si

dan Dr. Nawawi Nasir, M.Si selaku Ketua dan sekretaris Prodi, bapak Mayor Inf Nur Wahid Pasi Ter Korem 132/Tadulako, Kapten Inf Syamsul Bahri Pasi Ops Kodim 1306/Donggala, Sersan Kepala Stenly Lemuwa Batih Ops Kodim 1306/Donggala, Kopral Kepala Yudo Hertono yang telah meluangkan waktunya didalam memberikan masukannya.

DAFTAR RUJUKAN

Nawawi H. dan Martini M. 1985. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Sugiyono. 1989. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Yin, Robert K. 2002. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Terjemahan. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Tentara Nasional Indonesia.